PONTIANAK POST

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | 2019 | Hal.: 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

# Dorong LKPD Raih Predikat WTP

**BENGKAYANG**—Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat selaku perwakilan kementerian keuangan di daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kanwil DJPb mempunyai fungsi pembinaan teknis sistem akuntansi daerah terkait implementasi standar akuntansi pemerintahan pada instansi pemerintah daerah.

Pada tahun ini fungsi pembinaan tersebut telah dilaksanakan di Pemda Kabupaten Bengkayang, Kamis (27/6) dan Pemda Provinsi Kalbar, Jumat (5/7). Pada kesempatan tersebut Tim Akuntansi dari Kanwil DJPb melakukan diskusi dengan pejabat pengelola keuangan daerah, dan sekaligus dapat memberikan masukan berbagai hal tentang bagaimana meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Seperti kita ketahui, laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2018 telah diserahkan kepada pemda masing-masing oleh Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kalbar, Selasa (28/5).

Namun tidak semua laporan keuangan pemerintah daerah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Oleh karena itu masih ada langkah-langkah strategi yang harus dilakukan oleh pemda walalupun telah berpredikat WTP karena masih ada sejumlah catatan hasil temuan dari auditor BPK yang harus segera ditindaklanjuti agar jangan sampai temuan serupa terulang lagi ditahun berikutnya.

Pada akhirnya untuk meraih/mempertahankan predikat WTP atas LKPD, pemda dihadapkan pada berbagai tantangan yang terkait dengan sistem informasi, masih terdapat beberapa aplikasi yang memerlukan perbaikan maupun pengembangan yang lebih lanjut untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas baik.

Selain itu, keterbatasan SDM yang mencakup keterbatasan dalam hal kuantitas (jumlah personil yang in charge dalam pelaporan keuangan), maupun keterbatasan dalam hal kualitas (masih terdapat personil terkait pelaporan keuangan yang belum sepenuhnya memahami Akuntansi Pemerintah).

Komitmen stakeholders, mencakup komitmen seluruh stakeholders mulai dari level pimpinan hingga level teknis atas pelaporan keuangan pemerintah; Kompleksitas transaksi, hal ini mencakup ciri khas transaksi akuntansi berbasis akrual yang mengharuskan penyusun laporan keuangan untuk melakukan analisis dalam melakukan pencatatan atas transaksi tersebut; serta terdapat keterbatasan waktu dalam penyusunan laporan keuangan. *(r/*)*

PONTIANAK POST

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des

2019

Hal.: 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

IST

**ASISTENSI:** Tim Akuntansi Kanwil DJPb Kalbar berkunjung ke BPKAD Bengkayang dalam rangka asistensi akuntansi, Kamis (27/6).